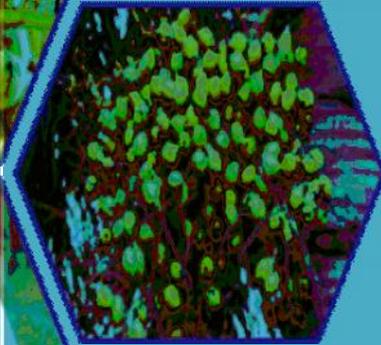


RENJA

Rencana Kerja
Tahun 2018



**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KAB.TANJUNG JABUNG BARAT - PROV.JAMBI**

Jalan Prof.Dr.Sri Soedewi Maschun Sofyan, SH Kuala Tungkal 365 12
Phone/Fax : (0742) 7351051 Email : disbunnaktanjabbarat@yahoo.com



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jln. Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH – Kuala Tungkal 36512
Phone/Fax : (0742) 7351015 Email : disbunnaktanjabbarat@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : /disbunak/ 2017

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja (Renja);
- b. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a diatas, dianggap perlu **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat :

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lemnbaran Negara No 4438);
4. UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 nomo 33, tambahan lembaran Negara nomor 4438);

5. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 89, Tambahan lembaran Negara nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
11. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi jambi nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Tanjung Jabung Barat;
15. Peraturan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tentang Lembaga Teknis Daerah;
16. Perda Kab Tanjung Jabung Barat tentang RTRW Kab Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
17. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
18. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab.Tanjab Barat No 23);
19. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;

21. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat;
22. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat;
23. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/ /Bappemdal/2017 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Kerja (*Renja*) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : KUALA TUNGKAL
TANGGAL : _____ 2017

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai laporan,
2. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai laporan,
3. Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai laporan,
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat,
5. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya kemudian dipertegas melalui PP Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten /kota dalam rangka melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Diperlukan pedoman yang memberikan arahan pembangunan yang hendak dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan diselenggarakan dengan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemajuan material dan spiritual.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Otonomi Daerah yang paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diperlukan suatu pedoman yang memberikan arahan dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Untuk itu, diperlukan suatu dokumen perencanaan yang disusun melalui lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu (1) politik, (2) teknokratik ; (3) partisipatif ; (4) atas bawah (*top - down*); dan (5) bawah - atas (*bottom - up*). Selain itu, perencanaan pembangunan peternakan perlu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Sehubungan dengan masa berlakunya dokumen perencanaan pembangunan perkebunan dan peternakan (Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat) tahun 2017 telah berakhir, maka demi kesinambungan perencanaan pembangunan peternakan, perlu segera disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 untuk menggantikan dokumen perencanaan pembangunan peternakan yang telah habis masa berlakunya. Dokumen ini memberikan arah, acuan dan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
 22. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 23. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat;
 24. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang

Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan yang dijadikan Rumusan Strategi, Pedoman Arah Kebijakan, Program pembangunan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu serta responsif terhadap perubahan yang bergerak secara dinamis, sehingga kebijakan dan program yang direncanakan dapat mendorong percepatan terwujudnya visi, misi dan program pembangunan yang telah ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi 2016 - 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014 - 2019 serta berbagai aspirasi seluruh stake holder pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Strategi dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan untuk 1 (satu) tahun kedepan, yaitu :

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi pembangunan perkebunan dan peternakan yang diharapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Sebagai acuan aparat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan perkebunan dan peternakan.
- c. Sebagai pangkal tolak dalam pengukuran kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan Penyusunan **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 adalah untuk

terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Lebih rinci, tujuan penyusunan Renja Tahun 2018 diarahkan agar dapat:

- a. Menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati kedalam bentuk kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- b. Merencanakan dan melakukan perubahan strategis.
- c. Mengelola dan memanfaatkan keberhasilan yang telah dicapai.
- d. Berorientasi kemasa depan, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan pelayanan prima kepada stake holders.
- f. Meningkatkan komunikasi dan informasi pembangunan.
- g. Digunakan sebagai pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Sitematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 terdiri dari 5 (Lima) Bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1) BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

2) BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3) BAB III. Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan.

4) BAB IV. Penutup.

BAB II

EVALUASI dan ANALISIS PELAKSANAAN RENJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016.

Secara umum kinerja pembangunan sektor Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 dinilai cukup baik dilihat dari pencapaian sasaran pembangunan maupun dari pencapaian indikator kinerja kegiatan (*input, output* dan *outcome*). Kinerja pencapaian sasaran pembangunan sektor Perkebunan dan Peternakan dapat dilihat pada Lampiran 1. Sedangkan secara singkat hasil kegiatan tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :

A. BIDANG PETERNAKAN



Pada Tahun 2016, Bidang Peternakan melaksanakan 9 Program (5 program wajib dan 4 Program Pilihan) secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Bidang Peternakan tertera dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah dan Realisasi Penggunaan Anggaran Bidang Peternakan
Tahun Anggaran 2016

No	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI		
		Jumlah	Proporsi (%)	Keuangan		Fisik (%)
				Jumlah	%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	354,014,252	12.78	335,172,705	94.68	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	298,291,746	10.77	281,087,179	94.23	100
3	Peningkatan Disiplin Aparat	19,600,000	0.71	19,600,000	100.00	100
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,850,000	0.93	25,850,000	100.00	100
5	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	118,139,000	4.26	112,344,700	95.10	100
6	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	556,249,995	20.08	554,071,000	99.60	100
7	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1,140,460,000	41.17	1,080,598,800	94.75	100
8	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	137,340,000	4.96	135,755,000	98.85	100
9	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	120,264,600	4.34	118,514,600	98.54	100
JUMLAH		2,770,209,593	100.00	2,662,993,984	96.13	100

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2016

Program Pilihan Bidang Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak ini bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ternak.

Program ini didukung dengan beberapa kegiatan antara lain kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular, Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah, Penanggulangan Penyakit Zoonosis, Pembelian dan Pendistribusian Obat-obatan Ternak dan Peralatan Medis dan Pendataan Masalah Penyakit Ternak.

Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 556.249.995,- yakni 20,08% dari anggaran keseluruhan. Realisasi keuangan sebesar 100% dan Realisasi fisik 100%. Dilihat dari jumlah pengobatan ternyata masih banyak kasus penyakit ternak namun dilihat dari angka kematian ternak

sudah menunjukkan angka penurunan dari tahun 2015 kematian 12 ekor dan tahun 2016 kematian ternak 9 ekor.

Tabel 2.2
Jumlah Pengobatan dan kematian ternak

No	PENGobatan				TINGKAT KEMATIAN	
	Tahun	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	%	Angka Kematian	%
1	2015	1.500	1.820	121,33	12	0,06
2	2016	1.000	1.760	176	9	0,05

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2016

2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Program peningkatan Produksi Hasil peternakan bertujuan untuk Peningkatan Populasi dan Produktivitas Ternak program ini didukung dengan beberapa kegiatan antara lain kegiatan Pembibitan dan Perawatan, Sinkronisasi Birahi, Pengembangan Inseminasi Buatan, Pengelolaan Ternak pemerintah, Penyangga Hari Besar Keagamaan, P2WKSS, Hari krida pertanian, pengembangan sentra peternakan.

Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1,140,460,000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.080.598,800,- atau sebesar 94.75% dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

Untuk mendukung Program Swasembada Daging kegiatan Gerakan Serentak Berahi (*Sinkronisasi Berahi*) sangat menunjang, karena kegiatan sinkronisasi berahi ini mempercepat peningkatan populasi ternak, ini dilihat dari jumlah angka kelahiran ternak selama 2 tahun ini mengalami peningkatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Pelaksanaan Gertak Birahi

Tahun	target (ekor)		Total	realisasi (ekor)			Kelahiran (ekor)		
	Sinkron	non sinkron		Sinkron	non sinkron	total	sinkron	non sinkron	total
2014	1.200	875	2.075	1.091	1.173	2.264	475	511	986
2015	1.400	2.000	3.400	1.731	1.649	3.380	533	508	1.041
2016	500	1.000	1.500	688	1.122	1.810	688	1.122	1.810

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2016

Peningkatan angka kelahiran ternak sapi cukup tinggi namun peningkatan populasi ternak sapi tidak menunjukkan angka yang sangat signifikan, hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah ternak yang dipotong, dan banyaknya jumlah ternak yang dijual keluar daerah. Selain itu untuk perhitungan populasi ternak tidak hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran tetapi dipengaruhi juga dengan pemotongan ternak, pengeluaran ternak, pemasukan ternak dan kematian ternak.

Tabel 2.4
Perkembangan ternak menurut jenis, 2015 - 2016 (Ekor)

Tahun Pelaksanaan	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam Buras	Itik	Babi
2015	7.193	607	40.195	634	913.464	84.447	63
2016*	8.616	675	71.586	750	1.713.010	106.060	93
Perkembangan 2015-2016(%)	19,78%	11,20%	78,10%	18,30%	87,53%	25,60%	47,62 %

Sumber Dinas : Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat
Ket.* angka sementara

Dilihat dari perkembangan populasi ternak sapi, kerbau, ayam buras, itik dan babi, kambing dan domba mengalami peningkatan.

Untuk ternak ayam broiler perhitungan populasi dihitung dari jumlah DOC yang masuk dan dipelihara, sementara DOC yang masuk banyak dikirim keluar daerah bukan dipelihara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini disebabkan karena peternak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak mau memelihara ayam broiler karena harga pakan yang cukup tinggi sehingga kalau memelihara ternak dalam jumlah yang kecil tidak menguntungkan.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ayam broiler pedagang lebih senang membeli ternak yang siap potong, karena selain harga pakan yang tinggi juga untuk mengurangi resiko kematian ternak, namun sampai saat ini belum pernah terjadi rawan pangan dari protein hewani.

Kebutuhan masyarakat akan protein hewani (daging, telur dan susu) terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani (daging, telur dan susu) maka perlu ketersediaan sumber protein hewani tersebut. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak ada peternak atau perusahaan yang memelihara ayam petelur sehingga untuk memenuhi konsumsi telur ayam ras di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mendatangkan telur dari luar daerah.

Untuk konsumsi susu masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih banyak mengkonsumsi susu formula, karena iklim di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak cocok untuk memelihara sapi perah dan masyarakat tidak terbiasa untuk mengkonsumsi susu segar.

Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani daging (ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas) upaya yang dilakukan Dinas Perkebunan dan Peternakan yaitu dengan meningkatkan populasi ternak, khusus untuk ternak besar (Sapi) dengan Gertak Birahi (sinkronisasi birahi)

Produksi daging ternak seperti : Sapi, kambing, domba, babi dan ayam buras mengalami penurunan, namun untuk ayam broiler meningkat ini dikarenakan kurangnya permintaan akibat harga yg masih tinggi pada harga sapi. jumlah pemotongan ternak setiap tahun dapat dilihat pada tabel 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 :

Tabel 2.5
Pemotongan Ternak Besar (ekor)

No	Tahun	Sapi (ekor)	Kerbau (ekor)
1	2015	2.159	75
2	2016*	1.993	56

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2016
Ket.* angka sementara

Tabel 2.6
Pemotongan Ternak Kecil (ekor)

No	Tahun	Kambing	Domba	Babi
1	2015	4.820	49	67
2	2016*	2.042	57	39

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2016
Ket.* angka sementara

Tabel 2.7
Pemotongan Ternak Unggas (ekor)

No	Tahun	Ayam Buras	Ayam Broiler	Itik
1	2015	677.866	2.061.285	41.039
2	2016*	175.316	3.749.582	13.315

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2016
Ket.* angka sementara

Tabel 2.8
Produksi Daging Ternak

Jenis Ternak	Capaian Tahun		Perkembangan (%)
	2015 (Kg)	2016 (Kg)*	
Sapi Potong	336.156	310.310	-7,69
Kerbau	12.345	9.218	-25,33
Kambing	53.695	22.748	-57,63
Domba	540	628	16,30
Babi	3.183	1.853	-41,78
Ayam Buras	494.842	127.981	-74,14
Ayam Broiler	1.710.867	3.112.153	81,91
Itik	35.704	11.584	-67,56

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2016

Ket.* angka sementara

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi peternakan bertujuan untuk membantu peternak dalam hal pemasaran hasil produk peternakan sehingga bisa mempermudah peternak dalam hal pemasaran hasil dan juga untuk mengetahui harga-harga produk peternakan sehingga bisa mengantisipasi kenaikan harga produk peternakan. Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 235.316.900 dengan realisasi keuangan Rp 232.263.900 atau sebesar 98,70% dan realisasi fisik sebesar 100%. Perkiraan Harga Produk Peternakan Tahun 2016 seperti tabel dibawah ini :

Tabel. 2.9
Perkiraan Harga Produk Peternakan Tahun 2016

Bulan	Harga Produk Pokok Peternakan (Rp)			
	Daging Sapi/ kg	Daging Kambing/ kg	Ayam Boiler/ Kg	Ayam Buras/ kg
1	2	3	4	5
JANUARI	130.000	60.000	30.150	48.250
FEBRUARI	130.000	60.000	26.625	45.000
MARET	130.000	60.000	22.710	40.800
1	2	3	4	5
APRIL	130.000	60.000	22.800	40.000
MEI	130.000	60.000	29.120	42.000
JUNI	130.000	60.000	30.040	55.000
JULI	130.000	60.000	35.400	47.000
AGUSTUS	130.000	60.000	30.550	52.000
SEPTEMBER	130.500	60.000	27.925	63.000
OKTOBER	140.000	60.000	28.100	55.500
NOVEMBER	140.000	60.000	25.680	47.000
DESEMBER	140.000	60.000	25.700	45.000

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2016

4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan bertujuan untuk meningkatkan Produktivitas Hasil Peternakan. Pada Program ini dilaksanakan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk 4 kelompok, sehingga limbah hasil ikutan ternak bisa dimanfaatkan dan menjadi nilai jual yang bisa menambah pendapatan peternak.

Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 120.264.600,-dengan realisasi keuangan Rp 118.514.600,-atau sebesar 98,54 % dan realisasi fisik sebesar 100%.

Peningkatan atau pencapaian yang diraih Bidang Peternakan secara keseluruhan cukup baik, dari realisasi keuangan 96,13 % realisasi fisik mencapai 100%.

Namun dalam hal pelaksanaan di lapangan program kegiatan tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor antara lain :

1. Masih rendah dan terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dan sumber daya peternak
2. Keterbatasan modal peternak untuk mengembangkan usaha peternakan
3. Masih tingginya tingkat penularan penyakit hewan menular
4. Sulitnya mencari sumber bibit ternak
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana petugas lapang
6. Masih kurangnya tenaga medis dan paramedis
7. Masih rendahnya biaya operasional petugas

Sedangkan beberapa tindak lanjut yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan sumber daya aparatur dan sumber daya peternak
2. Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha bagi peternak dan mendorong peran swasta dalam pembangunan peternakan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan
4. Penguatan kelembagaan kelompok budidaya ternak
5. Perlu pengadaan kendaraan roda 2 (dua) untuk petugas lapang

6. Perlunya penambahan formasi untuk tenaga medis dan paramedis
7. Perlunya penambahan anggaran untuk sektor peternakan.

B. BIDANG PERKEBUNAN.



Pada Tahun 2016, Bidang Perkebunan melaksanakan 7 Program (3 program wajib dan 4 Program Pilihan) secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Bidang Perkebunan tertera dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 2.10
Jumlah dan Realisasi Penggunaan Anggaran Bidang Perkebunan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2016

No	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI		
		Jumlah	Proporsi (%)	Keuangan		Fisik (%)
				Jumlah	%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	431,452,700	15.31	377,964,811	87.60	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	162,937,500	5.78	147,902,100	90.77	100
3	Peningkatan Disiplin Aparat	16,450,000	0.58	15,317,500	93.12	100
4	Peningkatan Kesejahteraan Petani	298,250,000	10.58	258,710,800	86.74	100
5	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	409,773,550	14.54	368,779,100	90.00	100
6	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	87,081,500	3.09	77,481,500	88.98	100
7	Peningkatan Produksi Perkebunan	1,412,480,600	50.12	1,244,627,000	88.12	100
JUMLAH		2,818,425,850	100.00	2,490,782,811	88.37	100

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2016

Program Pilihan Bidang Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1. Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani Perkebunan dan mengurangi biaya produksi bagi kebun sawit swadaya.

Program ini didukung dengan beberapa kegiatan antara lain kegiatan Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kelapa Sawit dan Enteres, Pembinaan dan inventarisasi kebun sawit swadaya.

Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 298.250.000,- yakni 10,58% dari anggaran keseluruhan. Realisasi keuangan sebesar 86,74% dan Realisasi fisik 100%. Dilihat dari capaian perkegiatan bahwa terlaksananya pemeliharaan kebun sawit percontohan seluas 9 Ha sebesar 100% dan terinventarisir kebun sawit swadaya untuk 3 Kecamatan yakni 500 Ha dari target 1.000 Ha atau sebesar 50%.

2. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

Program ini didukung dengan beberapa kegiatan antara lain : Pengendalian hama penyakit tanaman, Peningkatan perlindungan Usaha Perkebunan, Pengembangan Jaringan Irigasi lahan Perkebunan (TAM).

Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 409,773,550,- yakni 14,54% dari anggaran keseluruhan. Realisasi keuangan sebesar 90% dan Realisasi fisik 100%. Dilihat dari capaian perkegiatan bahwa terlaksananya Pengendalian hama penyakit tanaman 100 Ha sebesar 100%, Peningkatan perlindungan Usaha Perkebunan untuk 13 Kecamatan sebesar 100% dan Pengembangan Jaringan Irigasi lahan Perkebunan (TAM) melingkupi 173 Ha lahan perkebunan dengan realisasi 100%. Sebagai Indikator Utama pada program ini adalah meningkatnya jumlah lahan Produksi Perkebunan sebagaimana tergambar table dibawah ini :

Tabel. 2.11
Luas lahan Perkebunan
Tahun Anggaran 2015-2016

Komoditas	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016*	Realisasi thd Target 2016	% thd 2015
	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)		
1	2	3	4	5	6
Karet	14,806	14.806	14,035	94,79 %	94,79%
Kelapa Sawit	61,960	62.889	63,554	101,05 %	102,57%
Kelapa Dalam	54,908	54.908	54,537	99,32 %	99,32%
Kelapa Hibrida	-	-	-	-	-
Lada	-	-	-	-	-
Kakao	378	-	358	-	-
Pinang	9,882	10.030	10,524	104,92 %	106,49%
Kopi Libtukom	2,882	3.073	2,873	93,49 %	99,68%
Kemiri	-	-	-	-	-

*Ket : *Angka sementara*

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2016

3. Peningkatan Pemasaran hasil produksi Pertanian/Perkebunan.

Program ini didukung dengan kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan dan informasi harga produksi perkebunan besar anggaran Rp. 87,081,500,- atau 3,09% dari total anggaran keseluruhan, dengan target : penyusunan data/informasi harga produksi perkebunan selama 1 tahun sebagai bahan pengambilan kebijakan serta informasi bagi para petani. Realisasi sebesar 100 % dengan serapan anggaran 88,98%.

4. Peningkatan Produksi Perkebunan.

Program ini didukung dengan beberapa kegiatan antara lain kegiatan Pembinaan Lintas Sektoral, Pengolahan Data Statistik Perkebunan, Pembibitan kelapa sawit, Pemeliharaan blok tinggi (BPT), Pengadaan sarana prasarana pertanian, sinkronisasi program

perencanaan perkebunan dan pelaporan serta Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat.

Adapun tujuan program ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan produksi perkebunan. Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1,412,480,600,- yakni 50,12% dari anggaran keseluruhan. Realisasi keuangan sebesar 88.12% dan Realisasi fisik 100%.

Secara Umum Indikator Kinerja Utama pada Program ini adalah meningkatnya produksi perkebunan sebagaimana table berikut :

Tabel. 2.12
Produksi Perkebunan
Tahun Anggaran 2015-2016

Komoditas	Tahun 2015	Target 2016	Realisasi 2016*	Realisasi thd Target 2016	% thd 2015
	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)		
1	2	3	4	5	6
Karet	6,570	14.367	6,575	45,36 %	100,07 %
Kelapa Sawit	131,235	133.858	131,068	97,91 %	99,87%
Kelapa Dalam	54,608	55.824	50,837	91,06 %	93,09 %
Kelapa Hibrida	-	-	-	-	-
Lada	-	-	-	-	-
Kakao	60	-	37	-	-
Pinang	7,363	11.208	9,426	84,10 %	128,01 %
Kopi Libtukom	1,225	1.238	1,323	106,86 %	108 %
Kemiri	-	-	-	-	-

*Ket : *Angka sementara*

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2016

Dilihat dari capaian perkegiatan bahwa terlaksananya pemeliharaan kebun sawit percontohan seluas 9 Ha sebesar 100% dan terinventarisir kebun sawit swadaya untuk 3 Kecamatan yakni 500 Ha dari target 1.000 Ha atau sebesar 50%. Untuk pembibitan kelapa sawit target awal 10.000 bibit terealisasi sebesar 100 %.

2.2 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.

Visi dan Misi Kepala Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat yg dituang didalam RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan pertimbangan dalam penyusunan Renja. Sebagai mana Visi dan Misi Kab.Tanjung Jabung Barat :

Visi :
***Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas***

KODE	MISI
MISI 1	Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas
MISI 2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
MISI 3	Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan
MISI 4	Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Visi melalui Misi, dan sesuai dengan Tupoksi maka Dinas Perkebunan dan Peternakan akan mendukung Misi 3 yaitu : “Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan”. Dari aspek kajian Internal dan Eksternal maka Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam penyelenggaraan pelayanan terdapat beberapa permasalahan beserta factor yg mempengaruhi antara lain :

1. Rendahnya Produksi dan Produktifitas tanaman perkebunan dan peternakan.

Pada dasarnya produksi perkebunan dipengaruhi oleh produktifitas dan luas areal tanam. Produktifitas tanam juga harus diimbangi oleh sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan produktifitas. Hal-hal yg menyebabkan produktifitas rendah adalah :

- (a). Kebun dengan kondisi tua/rusak (TTR) cukup luas
- (b). belum optimal penggunaan bibit unggul dan saran produksi lainnya
- (c). kurang tersedia bibit bermutu di masyarakat
- (d). Pengendalian OPT belum dilaksanakan secara terpadu dan ramah lingkungan.
- (e). Gangguan usaha dan konflik perkebunan.
- (f). terbatasnya SDM petani dan petugas lapangan.
- (g) Perubahan Iklim.

Produktifitas Peternakan dipengaruhi oleh :

- (a). Ketersediaan bibit unggul ternak
- (b). Pengendalian Penyakit ternak yg masih terbatas sarana penunjang.
- (c). Pola peternakan yg masih sederhana/tradisionil
- (d). ketersediaan pakan yg masih terbatas dan mahal

2. Ketersediaan dan pemamfaatan lahan

Peningkatan jumlah penduduk yg sangat pesat dan distribusi yg tidak merata mengakibatkan daya dukung lahan terlampaui. Kondisi demikian menyebabkan persaingan dalam penggunaan lahan yg menyebabkan terjadinya konflik. Disisi lain lahan belum dikelola dan diolah secara ekonomis, efektif , efisien dan terintegrasi dengan peternakan sehingga pada gilirannya menyebabkan rendahnya nilai tambah bagi petani. Halhal yg perlu dicermati dengan ketersediaan dan pemamfaatan lahan adalah :

- (a). Penggunaan RTRW sesuai peruntukan
- (b). Komitmen pengusaha yg perlu didukung kebijakan

3. Rendahnya bilai tambah dan daya saing produk

Salah satu permasalahan yg dihadapi oleh petani dan peternak yg dikelola masyarakat yakni rendahnya mutu hasil produksi. Hasil perkebunan masih terkontaminasi oleh kotoran dan benda asing lainnya serta pengeringan yg kurang sempurna. Ternak yg dihasilkan masih rentan terhadap penyakit sehingga mudah mengalami sakit dan kematian. Hal ini menyebabkan harga yg diperoleh petani

masih rendah dan sulit diterima di pasaran Internasional. Hal yg perlu dicermati untuk meningkatkan mutu produk dan daya saing antara lain : (a). penanganan pasca panen; (b) pembinaan mutu dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan.

4. Akses terhadap sumber permodalan

Lemahnya permodalan menyebabkan petani/peternak sulit untuk mengembangkan usahanya sehingga mencari pinjaman kepada pihak lain yg tidak resmi (rentenir) dengan bunga yg sangat tinggi. Meskipun pemerintah telah menggulirkan Program Kredit namun masih terdapat beberapa kendala dari petani untuk mengaskes antara lain disebabkan :

- (a) Lemah dalam pemenuhan syarat Administrasi Perbankan
- (b) Resiko agribisnis yg sangat tinggi
- (c) Belum tersedianya lembaga keuangan khusus bagi petani/peternak
- (d) Belum tersedianya lembaga penjamin resiko agribisnis

5. Sumberdaya manusia dan Kelembagaan

Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yg menganani perkebunan/peternakan masih terbatas dan kurang memadai ditambah kurangnya pengetahuan dan ketrampilan petani sehingga menghambat pengembangan kedepan. Masalah kelambagaan juga menjadi perhatian yg sangat serius Karen belum optimalnya kemitraaan antara perusahaan perkebunan besar dengan kelompok petani dan belum sempurnanya infrastruktur pendukung system distribusi dan transportasi.

6. Isu Lingkungan Hidup dan Globalisasi

(a) Perubahan Iklim

Efek rumah kaca yg diakibatkan oleh segala aktivitas manusia dengan menggunakan sumber energy yg bersumber dari alam (fosil) seperti proses industry dan transportasi. Akibat akumulasi dari efek rumah kaca tersebut menyebabkan terjadinya pemanasan global. Perubahan iklim sangat berpengaruh besar terhadap sector perkebunan dan peternakan dari segi produktifitas, dan mutu. Selaian itu juga berpengaruh terhadap kerentanan dalam serangan organism pengganggu.

Selain itu dampak perubahan iklim juga mengakibatkan kebakaran hutan dan banjir.

(b) Liberalisasi Pasar.

Isu liberalisasi perdagangan semakin marak setelah disetujuinya GATT/WTO (*World Trade Organization*) oleh 122 negara termasuk Indonesia. Pentingnya perdagangan bebas antar Negara yg disebabkan kesamaan kepentingan, potensi, kebutuhan, hubungan geografis dan tradisi menyebabkan Negara mendorong membenuk kelompok/kawasan perdagangan seperti AFTA, NAFTA, APEC, ACFTA. Sebagai bagian dari Negara yg menganut ekonomi terbuka Indonesia harus ikut dan berpartisipasi dalam perdangan bebas, komitmen tersebut dimanifestasikan kedalam kerjasama seperti AFTA, APEC, ACFTA dan WTO.

Secara umum Negara yg menganut perdangangan liberal adalah menghilangkan secara bertahap hambatan tarif dan sebagai gantinya menerapkan hambatan non tarif dalam mekanisme ekspor-impor. Meskipun hambatan tarif dapat iatasi namun **Agribisnis Indonesia** dihadapi oleh *hambatan teknis* seperti : *Mutu Produk, Isu Lingkungan, Intellectual Property right, HAM dan Ketenagakerjaan.*

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi dan sinkronisasi antara Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, statistik penelitian dan pengembangan dalam penyusunan usulan awal program dan kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018.

2.4 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan terhadap usulan kegiatan yang diminta masyarakat ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat mengakomodir seluruhnya, karena keterbatasan dana APBD II, untuk dana melalui APBD II berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan melalui musrenbang Kabupaten. Untuk beberapa usulan kegiatan yang tidak terakomodir melalui dana APBD II akan diakomodir melalui dana APBD I dan APBN.

BAB III

TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Kebijakan Pembangunan Nasional.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional tersebut, dengan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam Pembangunan Pertanian maka Kementerian Pertanian RI menetapkan Visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA SISTEM PERTANIAN BIOINDUSTRI BERKELANJUTAN YANG MENGHASILKAN BERAGAM PANGAN SEHAT DAN PRODUK BERNILAI TAMBAH TINGGI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL UNTUK KEDAULATAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Pertanian RI menetapkan *Misi* sebagai berikut :

KODE	MISI
MISI 1	Mewujudkan kedaulatan pangan
MISI 2	Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
MISI 3	Mewujudkan kesejahteraan petani
MISI 4	Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian maka ditetapkan *Tujuan Pembangunan Pertanian periode 2015 -2019* yang ingin dicapai yaitu :

Tujuan	
T1	Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan
T2	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian
T3	Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
T4	Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

T5	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional
----	--

Sementara itu Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didasarkan pada Visi Pembangunan Nasional yang tercantum pada Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 - 2021 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat maju, adil, makmur, bermartabat dan berkualitas”**.

Berdasarkan Visi di atas, maka Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 adalah :

KODE	MISI
MISI 1	Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas
MISI 2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
MISI 3	Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan
MISI 4	Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

Berdasarkan misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatas, maka Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai dinas teknis daerah menggarisbawahi misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 pada poin 3.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Kab.Tanjung Jabung Barat maka ditetapkanlah **Tujuan Strategis (TS)**.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian **Tujuan Strategis (TS)** Pembangunan Perkebunan dan Peternakan diperlukan beberapa **Sasaran**

Strategis (SS) yg menggambarkan kondisi yg dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya ditetapkan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)** untuk mengukur apakah **Sasaran Strategis (SS)** dapat mengkonfirmasi **Tujuan Strategis (TS)** yg akan dicapai pada masa mendatang (Tahun 2021). Hal tersebut tergambar sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-n					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan serta Peningkatan Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan (T.1)	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan (SS.1) - Sawit - Karet - Kelapa - Kopi - Produksi Pinang	Bertambahnya Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) :						
			- Produksi Sawit	131,068	136,535	139,267	142,051	144,893	147,790
			- Produksi Karet	6,575	4,144	4,913	4,915	4,918	4,921
			- Produksi Kelapa	50,837	56,941	58,080	59,241	60,428	61,635
			- Produksi Kopi	1,323	1,263	1,288	1,314	1,340	1,367
			- Produksi Pinang	9,426	11,432	11,662	11,895	12,133	12,375
		Meningkatnya Pengelolaan Lahan Produktif (SS.2) - Sawit - Karet - Kelapa - Kopi - Produksi Pinang	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) :						
			- Luas Lahan Sawit	63,554	63,833	64,790	65,762	66,749	67,750
			- Luas Lahan Karet	14,035	9,821	9,826	9,831	9,836	9,841
			- Luas Lahan Kelapa	54,537	55,183	55,468	55,736	56,014	56,294
			- Luas Lahan Kopi	2,873	3,119	3,166	3,213	3,262	3,310
			- Luas Lahan Pinang	10,524	10,484	10,798	11,122	11,456	11,800

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-n					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Meningkatkan Produksi Daging Ternak dan Populasi Ternak (T.2)	Meningkatnya Produksi Daging (SS.3) - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas	Bertambahnya Produksi Daging Ternak (Kg) :						
			- Produksi Daging Sapi	310,310	285,658	291,371	297,199	303,143	309,205
			- Produksi Daging Kerbau	9,218	12,844	13,101	13,363	13,630	13,903
			- Produksi Daging Kambing	22,748	27,256	27,801	28,357	28,924	29,503
			- Produksi Daging Domba	628	562	573	584	596	608
			- Produksi Daging Unggas	3,251,718	2,331,966	2,378,600	2,426,179	2,475,444	2,524,952
		Meningkatnya Populasi Ternak (SS.4) - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas	Bertambahnya Populasi Ternak (Ekor) :						
			- Populasi Sapi	8,616	8,389	8,557	8,728	8,902	9,801
			- Populasi Kerbau	675	717	740	771	780	811
			- Populasi Kambing	71,586	48,002	48,550	48,910	49,228	49,378
			- Populasi Domba	750	790	816	845	865	890
			- Populasi Unggas	1,819,070	1,099,095	1,054,050	1,211,753	1,272,340	2,335,957

3.3 Strategi Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rumusan **Strategi** merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. **Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

Strategi

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan melalui *Intensifikasi, Extensifikasi* dan *Diversifikasi*.
2. Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktivitas ternak melalui *Sinkronisasi Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB)*, Pemetaan kawasan peternakan, integrasi ternak dengan tanaman, pemanfaatan bahan pakan lokal dan pemberdayaan peternak, serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.
3. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani.
4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan, dan vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit hewan menular strategis.
5. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui *Rumah Kompos, Biogas* dan lain lain.
6. Pengembangan *Sentra Agribisnis* di kawasan Sentra Perkebunan dan Peternakan.
7. Meningkatkan infrastruktur serta sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan.

Kebijakan

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. ***Kebijakan Umum*** Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yang bermutu, pengendalian OPT, serta pengawasan peredaran Bibit, pupuk dan Pestisida.
2. Mewujudkan Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana keswan, obat-obatan, medis dan paramedis.
4. Peningkatan Pengelolaan sumberdaya Peternakan yang optimal dan berkelanjutan.

**Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021**

VISI : “ TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS ”			
MISI 3: “ Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan ”.			
Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
<i>Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan serta Peningkatan Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan (T.1)</i>	Meningkatnya produksi Komoditi Perkebunan (SS.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan hasil produksi dan Produktifitas Hasil Perkebunan. 2. Meminimalisir serangan Hama Penyakit Tanaman. 3. Meningkatkan kapasitas SDM Penyuluh dan Pelaku Usaha Perkebunan 4. Meningkatkan pengelolaan lahan produktif dengan pengembangan tanaman penyegar tahunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peningkatan hasil produksi melalui Intensifikasi, Diversifikasi, Ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yg bermutu. 2. Pengendalian OPT serta pengawasan peredaran Pupuk, Bibit dan Pestisida. 3. Penyebaran dan pemanfaatan tenaga penyuluh dalam pembinaan Kelompok Tani 4. Penyediaan bantuan bibit dan sarana produksi lainnya yg merupakan penunjang pengolahan perkebunan
	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif (SS.2)		
<i>Meningkatkan Produksi Daging Ternak dan Populasi Ternak (T.2)</i>	Meningkatnya produksi Daging (SS.3)	Peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak melalui Gerakan Serentak Birahi (Gertak Birahi) melalui Kawin Suntik (IB), pemetaan perwilayahan, Integrasi Ternak dengan Sawit, Pemanfaatan Bahan pakan Lokal dan pemberdayaan peternak serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.	Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan guna mendukung peningkatan populasi dan produksi peternakan.
	Meningkatnya Populasi Ternak (SS.4)		

3.4 Kebijakan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan adalah arah atau tujuan yang diambil oleh pemerintah daerah (organisasi) untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dalam perwujudan sasaran Visi dan Misi. Maka kebijakan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 adalah :

5. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yang bermutu, pengendalian OPT, serta pengawasan peredaran Bibit, pupuk dan Pestisida
6. Mewujudkan Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak.
7. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana keswan, obat-obatan, medis dan paramedis
8. Peningkatan Pengelolaan sumberdaya peternakan yang optimal dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian, maka program untuk tahun 2017 - 2021 kedepan, penyusunan program pembangunan peternakan akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk Tahun 2018 Program dan Kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga apa yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2018 yang akan datang.

Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Renja juga dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik lagi dimasa mendatang, dan semoga bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB.TANJUNG JABUNG BARAT

Urusan Wajib : Belanja Rutin

Tujuan Strategis (TS)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)				Pelaksana Eselon III
						Target 2018	Target 2018 (Rp.)	Target 2019	Target 2019 (Rp.)	
1	2	3	4	5	7	12	13	14	15	22
<i>Terselenggaranya tata pemerintahan yg baik, bersih, efisien, berwibawa, transparan dan profesional</i>			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran	%	100	1,234,611,527	100	1,293,567,103	Sekretariat
			Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	%	100	4,050,000	100	4,333,500	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	bulan	12	142,800,000	12	147,084,000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya honorarium jasa adm keuangan	paket	1	121,700,000	1	127,785,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	12	20,047,067	12	21,049,420	
			Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya atk kantor	bulan	12	110,607,510	12	116,137,886	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya baran cetak dan penggandaan	bulan	12	14,250,000	12	14,962,500	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen intalasi listrik	bulan	12	10,421,950	12	10,943,048	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	paket	1	6,000,000	1	6,300,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum	bulan	12	27,720,000	12	29,106,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	12	777,015,000	12	815,865,750	
			Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	tersedianya honorarium jasa adm teknis perkantoran	bulan					
<i>Terselenggaranya tata pemerintahan yg baik, bersih, efisien, berwibawa, transparan dan profesional</i>			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	%	95	294,525,000	95	283,199,000	Sekretariat/Sarana prasarana
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit		21,375,000		5,000,000	
			- AC		M2	95	21,375,000	1	5,000,000	
			- Gorden							
			Pengadaan peralatan gedung kantor	terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor			13,600,000		14,960,000	
			- printer		unit	3	13,600,000	2	14,960,000	
			Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan operasional	Unit	48	231,300,000	48	238,239,000	
			Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor			28,250,000			
			- Pemeliharaan AC, Komputer, Printer		unit	55	28,250,000	55	29,662,500	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	%	100	-	100	25,000,000	
			- Perencanaan dan Pengawasan							
			- Pemeliharaan rutin gedung kantor UPT		unit			3	15,000,000	
			- Pemeliharaan rutin gedung kantor Dinas		paket			1	10,000,000	

Tujuan Strategis (TS)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)				Pelaksana Eselon III
						Target 2018	Target 2018 (Rp.)	Target 2019	Target 2019 (Rp.)	
1	2	3	4	5	7	12	13	14	15	22
Terselenggaranya tata pemerintahan yg baik, bersih, efisien, berwibawa, transparan dan profesional			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	%	100	40,125,000	100	44,137,500	Sekretariat
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	89	40,125,000	77	44,137,500	
Terselenggaranya tata pemerintahan yg baik, bersih, efisien, berwibawa, transparan dan profesional			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan PNS	%	85	15,000,000	90	15,000,000	Sekretariat
			Pengembangan SDM	jumlah PNS yg mengikuti pelatihan/diklat	org	3	15,000,000	3	15,000,000	
Urusan Pilihan : Pertanian										
Tujuan Strategis (TS)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)				Pelaksana Eselon III
						Target 2018	Target 2018 (Rp.)	Target 2019	Target 2019 (Rp.)	
1	2	3	4	5	7	12	13	14	15	22
T.3 Meningkatkan Pengelolaan Agribisnis Perkebunan serta Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dengan Pemamfaatan IPTEK	SS.7 Meningkatnya Promosi dan Publikasi Hasil Produk Unggulan Perkebunan	IKSS 3.5 Promosi dan Publikasi Produk Unggulan Perkebunan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	terpenuhinya promosi produk unggulan perkebunan	kali	2	68,250,000	2	75,075,000	Bid Perkebunan/Bid Penyuluh
			Promosi atas hasil produksi perkebunan	terlaksananya publikasi dan promosi produk unggulan daerah	kali	2	68,250,000	2	75,075,000	
T.4 Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan dan Peternakan	SS. 9 Meningkatnya sarana dan prasarana Pembangunan Perkebunan dan Peternakan	IKSS 4.1 Terbangunnya Jalan Produksi Perkebunan (km)	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	kelompok tani yg menerapkan teknologi perkebunan dan Peternakan	KT	10	309,845,000	10	1,864,468,750	Bid Sarana prasarana
			Pengadaan Prasarana dan Sarana Perkebunan	terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana perkebunan			309,845,000		1,864,468,750	
		IKSS 4.2 Jumlah Kelompok Tani yg menggunakan Peralatan untuk Budidaya dan Pasca Panen								
			- operasional				59,607,500		59,607,500	
			- Sarana lantai jemur		kodi	100	150,000,000	100	165,000,000	
			- Mesin Pengolah Pasca Panen		Unit	2	28,000,000	2	30,800,000	
			- Mesin Chover		Unit	2	60,000,000	2	66,000,000	
			- Peralatan Labor dan lainnya		Unit	3	12,237,500	1	13,461,250	
			- Biogas		Unit			1	45,000,000	
			- Jalan Produksi Perkebunan		Km			5	1,484,600,000	APBN / APBD I

T.1 Meningkatkan Produksi komoditi Perkebunan serta Peningkatan Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan	SS.1 Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan.	IKSS .1.1 Produksi Komoditi Perkebunan (ton) : (1). Sawit (2). Karet (3). Kelapa (4). Pinang (5).Kopi	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Meningkatnya produksi (ton) dan Luas Lahan (Ha) 5 komoditi unggulan: kopi,karet,sawit,pinang,kelapa dalam	Produksi = Ton, Luas Lahan = Ha		2,288,756,250		2,622,476,303	Bidang Perkebunan
	SS.2 Meningkatnya Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan.	IKSS 1.2 Luas Perkebunan (Ha) : (1). Sawit (2). Karet (3). Kelapa (4). Pinang (5).Kopi	Pembangunan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM) Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kopi Libtukom Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa, Pinang dan Kopi Libtukom - Kelapa - Pinang - Kopi Libtukom	luas lahan terairi TAM terpeliharanya kebun percontohan kopi LIBTUKOM intensifikasi lahan kopi rakyat terpeliharanya BPT kelapa,pinang dan kopi libtukom	Ha Ha Ha PIK PIP Ha	100 5 3717 250 30	135,230,000 60,100,250 110,161,000	100 5 3717 250 30	141,991,500 63,105,263 148,938,000 115,669,050	Bidang Perkebunan
			Pembibitan Kelapa Sawit Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Lahan, Kebun dan Konflik Lahan Perkebunan Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pembinaan Lintas Sektoral - Pelatihan Dinamika Kelompok - Pengadaan bibit unggul tanaman - Pengadaan pupuk dan obatan tanaman Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kelapa Sawit dan Kebun Entres Revitalisasi kebun Kopi Libtukom Fasilitasi Peremajaan kebun Kelapa Sawit Pemeliharaan Demplot Kelapa Dalam Peremajaan kebun karet rakyat	tersedianya bibit kelapa sawit yg bermutu terlaksananya pencegahan dan pengendalian karhutla dan konflik lahan terlaksananya pembinaan,pengawasan pupuk dan pestisida pengadaan bantuan lintas sektoral teratasinya serangan OPT kebun rakyat terlaksananya pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan terpeliharanya kebun percontohan kelapa sawit dan kebun entres luas lahan peremajaan kopi libtukom luas lahan peremajaan kelapa sawit terlaksananya demplot kelapa dalam luas lahan peremajaan karet	kecambah kecamatan kecamatan Desa Org Paket Paket Ha kali Ha Ha Ha Ha Ha	7,500 13 13 2 50 1 1 200 30 9 100 500 10 Ha	308,376,400 131,300,000 55,940,000 68,420,600 106,395,000 59,660,000 136,068,000 834,960,000 145,665,000 136,480,000	10,000 13 13 2 50 1 1 200 30 9 100 500 10 50	314,543,928 133,926,000 57,058,800 69,789,012 108,522,900 61,449,800 142,871,400 868,358,400 152,948,250 143,304,000 100,000,000	APBD/APBN

Tujuan Strategis (TS)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)				Pelaksana Eselon III
						Target 2018	Target 2018 (Rp.)	Target 2019	Target 2019 (Rp.)	
1	2	3	4	5	7	12	13	14	15	22
T.3 Meningkatkan Pengelolaan Agribisnis Perkebunan serta Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dengan Pemanfaatan IPTEK	SS.6 Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Peternakan	IKSS 3.4 Peningkatan koordinasi antar penyuluh dan instansi terkait	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan	Meningkatnya Koordinasi antara penyuluh dan instansi terkait	%	100	75,310,000	100	77,569,300	Bidang Penyuluh
			Pertemuan Koordinasi Penyuluh Bidang Perkebunan/Peternakan	terlaksananya koordinasi penyuluh perkebunan/peternakan	kali	4	75,310,000	4	77,569,300	
T.2 Meningkatkan Produksi Daging Temak dan Populasi Temak	SS 5. Menurunnya angka kematian temak	IKSS 2.4. Persentase menurunnya kematian temak (%)	Program Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Temak	menurunnya angka kematian ternak (%)	%	1.8	517,961,930	1.7	568,500,788	Bidang Peternakan
			Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah ternak yg terlayani pengobatan,PKB, pemeriksaan spesimen, vaksinasi, eliminasi	ekor	2000	433,361,930	2000	446,362,788	
			- Pengobatan - PKB - Pemeriksaan Spesimen - Vaksinasi - Eliminasi		ekor	1000		1000		
			Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	terlaksananya pengawasan perdagangan ternak dan pemotongan	ekor	1000		1000		
			Sosialisasi penyakit zoonosis	terlaksananya sosialisasi penyakit zoonosis	ekor	2500		2500		
					ekor	100		100		
					bulan	12	84,600,000	12	87,138,000	
					kali			4	35,000,000	
T.2 Meningkatkan Produksi Daging Temak dan Populasi Temak	SS 3. Meningkatnya Produksi Daging	IKSS 2.1. Produksi daging Temak (kg) : (1). Sapi (2) Kerbau (3). Kambing (4). Domba (5). Unggas	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	meningkatkan populasi dan produksi hewan ternak:sapi,kerbau,kambing,domba,babi,ayam broiler,ayam buras,itik	Populasi = ekor,produksi = kg		1,127,441,030		2,375,713,100	Bidang Peternakan
	SS 4. Meningkatnya Populasi Hewan Temak	IKSS 2.2. Populasi Hewan Temak (ekor) : (1). Sapi (2) Kerbau (3). Kambing (4). Domba (5). Unggas	pemeliharaan ternak sapi bakalan	terpeliharanya sapi bakalan	ekor			20	350,000,000	APBN / APBD I
			Lomba agribisnis peternakan	terlaksananya lomba agribisnis peternakan	kali	1	43,035,000	1	45,186,750	
			Pengembangan Inseminasi Buatan Sinkronisasi Birahi	jumlah sapi IB	ekor	1500	282,600,000	1000	296,730,000	
			Penyangga Hari Besar Keagamaan	jumlah sapi IB	ekor	500	103,388,000	500	108,557,400	
			Pusat Pengembangan Itik Daerah	tersedianya daging untuk konsumsi hari besar keagamaan	kg	900	195,100,000	900	204,855,000	
			Pengembangan ternak ruminansia	terkelolanya pusat pengembangan itik daerah	ekor	500	216,969,000	500	227,817,450	
			Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif	terlaksananya pengembangan ternak ruminansia	ekor	20	219,619,030	50	772,500,000	
			Pengembangan sentra peternakan	persentase pemotongan ternak betina produktif	%	20%	66,730,000	20%	70,066,500	
	terlaksananya sosialisasi	KT			1	300,000,000				

Tujuan Strategis (TS)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)				Pelaksana Eselon III	
						Target 2018	Target 2018 (Rp.)	Target 2019	Target 2019 (Rp.)		
1	2	3	4	5	7	12	13	14	15	22	
T.3 Meningkatkan Pengelolaan Agribisnis Perkebunan serta Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dengan Pemamfaatan IPTEK	SS.6 Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Peternakan	IKSS 3.3 Jumlah Kelompok Peternak yg menerapkan Teknologi Peternakan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	jumlah kelompok peternak yg menerapkan teknologi peternakan	KT	2	39,179,000	2	41,137,950	Bid Peternakan/Bid Sarana Prasarana	
			Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	terlaksananya pelatihan TTG	KT	10	39,179,000	10	41,137,950		
T.3 Meningkatkan Pengelolaan Agribisnis Perkebunan serta Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dengan Pemamfaatan IPTEK	SS.6 Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Peternakan	IKSS 3.1 Jumlah Petani Perkebunan yg mengikuti Pelatihan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	meningkatnya kepatuhan dan kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan lembaga/asosiasi petani pada komoditi unggulan	komoditi	5	285,877,346	5	294,453,666	Bid Sarana Prasarana/Bid Penyuluh	
		IKSS 3.2 Jumlah STD-B yg dimiliki Petani Perkebunan	Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan	terbinanya asosiasi dan terjalannya kerjasama kemitraan	aso	5	47,250,000	5	48,667,500		
			Pelatihan Pemberdayaan Petani Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)	terlaksananya pelatihan SKE	Org	125	81,627,346	125	84,076,166		
			Pembinaan dan inventarisasi kebun sawit swadaya	diperolehnya STD-B untuk kebun sawit swadaya	ha	700	157,000,000	700	161,710,000		
T.3 Meningkatkan Pengelolaan Agribisnis Perkebunan serta Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dengan Pemamfaatan IPTEK	SS.8 Tersedianya Data dan Informasi Perkebunan dan Peternakan	IKSS 3.6 Tersedianya data yg valid dan up to date	Program Pengembangan Data/Informasi	tersedianya data perkebunan dan Peternakan yg valid dan up to date	%	100	633,509,450	100	652,514,734	Sekretariat/Bid.Penyuluh/Bid Peternakan	
			Pengolahan Data Statistik Perkebunan dan Peternakan	tersedianya data statistik perkebunan dan Peternakan	buku	20	170,545,000	20	175,661,350		
			Penyebaran Informasi Perkebunan	tersediannya dokumen informasi pasar perkebunan	dok	1	86,993,750	1	89,603,563		
			Sinkronisasi Program Perencanaan Perkebunan Peternakan dan Pelaporan	tersediannya Dokumen RENJA,RKA dan Dokumen SAKIP	dok	4	75,140,000	4	77,394,200		
			Pengelolaan Temak Pemerintah	terkelolanya pusat temak daerah	kali	1	178,355,700	1	183,706,371		
			Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan	tersediannya dokumen informasi pasar peternakan	bulan	12	122,475,000	1	126,149,250		
Total								6,930,391,533		10,207,813,194	